

DIPLOMASI PERTAHANAN MELALUI KERJA SAMA KEAMANAN VVIP: PERAN PASPAMPRES DALAM HUBUNGAN PERTAHANAN INDONESIA–KOREA SELATAN PERIODE 2019–2023

Cakra Dirgantara¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the contribution of the Indonesian Presidential Security Force (Paspampres) as an instrument of Indonesia's defence diplomacy within the framework of VVIP security cooperation with the Presidential Security Service (PSS) of South Korea during the 2019–2023 period. The background of this research stems from the increasing intensity of bilateral defence relations between Indonesia and South Korea, which not only encompass conventional military dimensions but also extend to the domain of head-of-state security as an arena of non-combat military diplomacy. The objective of this study is to analyze in depth the roles, mechanisms, and outcomes of defence diplomacy generated through joint exercises between Paspampres and the PSS. This research employs a qualitative descriptive-analytical approach, with data collected through library research and internet-based research, and analyzed using Gindarsah's (2015) defence diplomacy framework, which consists of three main indicators: confidence building, capacity building, and defence cooperation.

The findings reveal that the contribution of Paspampres to defence diplomacy is layered and multidimensional, being most dominant at the bilateral technical-operational level, fairly significant within the global context and diplomatic outcomes, and supportive at the ASEAN regional level. The joint exercises with the PSS during 2019–2023 were proven to generate strategic trust, enhance the institutional capacity of Paspampres, strengthen bilateral relations, and improve Indonesia's international reputation. This study confirms that modern defence diplomacy can be effectively carried out by elite non-combat units as strategic instruments for building sustainable interstate relations.

Keywords: Defence diplomacy, Paspampres, Presidential Security Service, VVIP security cooperation, Indonesia–South Korea relations

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kontribusi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerangka kerja sama keamanan VVIP dengan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan selama periode 2019–2023. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya intensitas hubungan pertahanan bilateral Indonesia–Korea Selatan yang tidak hanya mencakup dimensi militer konvensional, tetapi juga menjangkau domain pengamanan kepala negara sebagai arena diplomasi militer non-tempur. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara mendalam peran, mekanisme, dan outcome diplomasi pertahanan yang dihasilkan dari latihan bersama Paspampres–PSS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian berbasis internet, serta dianalisis menggunakan kerangka teori diplomasi pertahanan Gindarsah (2015) yang mencakup tiga indikator utama: confidence building, capacity building, dan defence cooperation.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Paspampres dalam diplomasi pertahanan bersifat berlapis dan multidimensional, paling dominan pada level bilateral teknis-operasional, cukup signifikan pada konteks global dan outcome diplomatik, serta bersifat pendukung pada level regional ASEAN. Latihan bersama

PSS periode 2019–2023 terbukti menghasilkan kepercayaan strategis, peningkatan kapasitas institusional Paspampres, penguatan hubungan bilateral, dan peningkatan reputasi internasional Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi pertahanan modern dapat dijalankan secara efektif oleh unit elite non-tempur sebagai instrumen strategis dalam membangun relasi antarnegara yang berkelanjutan.

Kata kunci: Diplomasi pertahanan, Paspampres, Presidential Security Service, kerja sama keamanan VVIP, Indonesia–Korea Selatan

PENDAHULUAN

Diplomasi pertahanan merupakan salah satu instrumen strategis dalam hubungan internasional modern yang memanfaatkan kapasitas dan institusi militer bukan untuk tujuan perang, melainkan sebagai sarana membangun kerja sama keamanan, memperkuat persahabatan antarbangsa, serta menjaga stabilitas regional dan global. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Korea Selatan, diplomasi pertahanan telah berkembang menjadi pilar strategis yang menopang kemitraan bilateral sejak dibukanya hubungan diplomatik resmi pada tahun 1973. Selama lebih dari lima dekade, kedua negara telah mengembangkan berbagai bentuk kerja sama pertahanan, mencakup latihan militer bersama, transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan secara kolaboratif, serta pertukaran pendidikan dan pelatihan militer.

Salah satu dimensi yang kerap luput dari perhatian akademik adalah peran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam kerangka diplomasi pertahanan bilateral. Paspampres merupakan satuan elite TNI yang bertanggung jawab atas keamanan protokol kepala negara. Dalam konteks hubungan dengan Korea Selatan, Paspampres menjalin kerja sama rutin dengan Presidential Security Service (PSS), lembaga pengamanan presiden Korea Selatan, melalui serangkaian latihan bersama yang berlangsung secara berkelanjutan sejak sebelum periode 2019 hingga 2023. Latihan ini tidak sekadar mentransfer keterampilan teknis pengamanan, melainkan juga berfungsi sebagai medium diplomasi militer yang memperlihatkan profesionalisme Indonesia dan komitmen dalam membangun kepercayaan strategis dengan Korea Selatan.

Relevansi penelitian ini semakin menguat mengingat dinamika geopolitik kawasan Asia-Pasifik yang terus berubah, termasuk meningkatnya ancaman asimetris seperti terorisme, serangan terhadap pejabat publik (seperti yang tercermin dalam pembunuhan mantan PM Jepang Shinzo Abe pada 2022), serta proliferasi ancaman berbasis teknologi seperti drone komersial. Dalam konteks tersebut, kerja sama keamanan VVIP bukan lagi sekadar urusan teknis pengawalan, melainkan bagian dari arsitektur keamanan regional yang lebih luas.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apa saja kontribusi Paspampres dalam diplomasi pertahanan Indonesia–Korea Selatan melalui pelaksanaan latihan bersama PSS periode 2019–2023? Tujuan penelitian adalah menganalisis secara komprehensif peran, mekanisme, faktor-faktor intervening, serta outcome diplomasi pertahanan yang dihasilkan dari kerja sama Paspampres–PSS. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur diplomasi pertahanan yang umumnya berfokus pada kekuatan militer konvensional, dengan menghadirkan perspektif bahwa unit pengamanan elite non-tempur juga dapat menjadi instrumen diplomasi pertahanan yang efektif dan strategis.

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme

Penelitian ini menempatkan neorealisme sebagai landasan makro untuk memahami motivasi struktural di balik kerja sama pertahanan Indonesia–Korea Selatan. Berdasarkan teori Kenneth N. Waltz (1979), sistem internasional bersifat anarkis dan tidak memiliki otoritas sentral, sehingga negara-negara didorong untuk memaksimalkan keamanan guna bertahan. Dalam kondisi anarki tersebut, kerjasama militer non-tempur seperti latihan bersama Paspampres–PSS merupakan respons rasional terhadap ketidakpastian strategis kawasan. Konteks Semenanjung Korea yang tidak stabil akibat program nuklir dan misil Korea Utara, serta dinamika Laut Cina Selatan, mendorong kedua negara membangun jaringan keamanan melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Diplomasi Pertahanan

Kerangka analitik utama yang digunakan adalah konsep diplomasi pertahanan sebagaimana dirumuskan oleh Iis Gindarsah (2015) dalam kajiannya mengenai diplomasi pertahanan Indonesia. Gindarsah mengidentifikasi tiga fungsi utama diplomasi pertahanan, yakni: (1) confidence building, yaitu upaya membangun kepercayaan strategis dan mengurangi persepsi ancaman melalui interaksi yang berkelanjutan; (2) capacity building, yaitu peningkatan kapasitas dan profesionalisme institusi pertahanan melalui pendidikan, pelatihan, dan pertukaran personel; serta (3) defence cooperation, yaitu penguatan kerja sama pertahanan bilateral dan pengembangan kemitraan strategis jangka panjang. Kerangka Gindarsah dipilih karena memiliki kesesuaian konseptual yang tinggi dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 17 Tahun 2018 tentang Diplomasi Pertahanan, sehingga relevan secara normatif dan analitis dalam konteks penelitian ini.

Diplomasi Militer

Sebagai kerangka komplementer, penelitian ini juga menggunakan konsep military diplomacy dari Andrew Cottey dan Anthony Forster dalam *Reshaping Defence Diplomacy* (2004). Cottey dan Forster mengonseptualisasikan diplomasi militer sebagai bentuk interaksi militer-ke-militer yang bertujuan membangun transparansi, kepercayaan, dan interoperabilitas. Mereka mengidentifikasi empat fungsi utama diplomasi militer, yaitu: membangun kepercayaan dengan mitra potensial, mempengaruhi negara lain melalui demonstrasi kapabilitas, mengelola hubungan dengan mantan musuh, serta mendukung agenda politik luar negeri. Dalam konteks penelitian ini, interaksi Paspampres–PSS dapat dikategorikan sebagai military diplomacy elite, yakni kerja sama unit pengamanan kepala negara yang membangun kepercayaan taktis di tengah dinamika kawasan yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna, proses, dan dinamika fenomena sosial secara mendalam dalam hal ini, peran Paspampres dalam diplomasi pertahananyang tidak dapat diukur secara memadai. Dimensi deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis peran, aktivitas, dan mekanisme kerja sama yang

diteliti, sementara dimensi analitis digunakan untuk menafsirkan serta menjelaskan dinamika, faktor-faktor yang memengaruhi, dan implikasi dari fenomena tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) tunggal, berfokus pada kerja sama bilateral Paspampres–PSS selama periode 2019–2023. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai human instrument, yang bertugas mengumpulkan, menelaah, menginterpretasi, dan menganalisis data dari berbagai sumber secara kritis dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, studi kepustakaan yang mencakup kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan pertahanan yang relevan. Kedua, penelitian berbasis internet (internet-based research) yang memungkinkan akses terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang tersedia secara daring, termasuk dokumen pemerintah Korea Selatan, siaran pers Kementerian Pertahanan, dan laporan lembaga riset strategis internasional.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data (pemilahan dan penyederhanaan data relevan), penyajian data (penyusunan informasi secara terstruktur dan naratif), serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan memadukan data dari wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur yang kemudian diuji silang guna memastikan konsistensi informasi dan ketepatan interpretasi.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Latihan Bersama Paspampres–PSS Periode 2019–2023

Hubungan pertahanan Indonesia–Korea Selatan telah mengalami evolusi signifikan dari sekadar pertukaran kunjungan militer menjadi kerja sama teknis yang terstruktur antara Paspampres dan PSS. Menurut dokumen resmi Korea.net, PSS telah menyediakan program pelatihan bagi pejabat keamanan presiden dari berbagai negara sejak 2009. Hingga periode pelaporan, lebih dari 500 perwira dari sekitar 10 negara mitra telah mengikuti kursus yang diselenggarakan PSS, menjadikannya sebagai pusat pelatihan pengamanan kepala negara berstandar tinggi di kawasan Asia-Pasifik.

Memasuki 2019, kerja sama mencapai fase intensifikasi dengan pelaksanaan modul latihan yang lebih mendalam. Latihan difokuskan pada kompetensi teknis protective intelligence, taktik pencegahan ancaman sniper, dan skenario evakuasi VVIP. Program ini dirancang tidak sekadar sebagai transfer keterampilan, melainkan sebagai upaya membangun common operational understanding antarunit keamanan VVIP kedua negara.

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020–2021 berdampak pada intensitas latihan tatap muka. Kedua negara merespons dengan adaptasi formatnya melalui sesi virtual coordination and simulation training, pertukaran modul pembelajaran berbasis teknologi, serta diskusi daring yang difasilitasi instruktur PSS. Meskipun terjadi penurunan intensitas fisik, dialog strategis tetap dipertahankan, mencerminkan komitmen kedua institusi untuk menjaga kesinambungan kerja sama dalam kondisi krisis global.

Pada 2022, dengan berkurangnya pembatasan perjalanan internasional, sesi pelatihan tatap muka kembali digelar, termasuk kunjungan delegasi Paspampres ke Seoul untuk modul pengamanan rute darurat dan koordinasi operasi. Pelatihan semakin berfokus pada

pengembangan Standard Operating Procedures (SOP) terpadu untuk respons insiden kompleks, termasuk ancaman teknologi, gangguan keamanan publik, dan koordinasi tim advance team.

Pada 2023, kegiatan latihan bersama mencapai fase konsolidatif dengan melibatkan capstone scenarios yang mengintegrasikan teknologi intelijen, counter-surveillance operations, serta latihan situasi nyata yang mensimulasikan ancaman berskala tinggi. Puncak penguatan kerja sama terjadi ketika Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Korea Selatan menandatangani MoU on Peacekeeping and Strategic Cooperation, yang turut memasukkan agenda penguatan kapasitas unit pengamanan VVIP dalam kerangka kerja sama pertahanan yang lebih luas.

Lapis 1: Kontribusi pada Regional Confidence Building (ASEAN/ARF/ADMM)

Pada lapisan pertama, kontribusi Paspampres dalam diplomasi pertahanan bersifat pendukung (supporting indicator) dalam konteks arsitektur keamanan regional Asia Tenggara. Hubungan pertahanan Indonesia–Korea Selatan tidak dapat dipahami secara terpisah dari kerangka ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), dan ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus). Korea Selatan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai Experts' Working Group ADMM-Plus yang mencakup keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, penanggulangan terorisme, hingga operasi pemeliharaan perdamaian, menunjukkan bahwa hubungan keamanan ROK dengan ASEAN tidak hanya bersifat retorik tetapi substantif.

Dalam tatanan regional ini, Indonesia selama periode 2019–2023 memosisikan diri sebagai norm entrepreneur yang mendorong kerja sama fungsional melalui mekanisme pertahanan multilateral. Diplomasi pertahanan dalam kerangka ASEAN tidak bersifat militer agresif, tetapi berfokus pada penguatan kerja sama, mitigasi ancaman, dan peningkatan kapasitas lembaga keamanan nasional. Paspampres dalam konteks ini berperan sebagai "extension actor" ASEAN, yakni aktor keamanan non-tempur yang mewakili Indonesia dalam mengadopsi, menyerap, dan mengintegrasikan praktik keamanan internasional ke dalam tatanan keamanan kawasan.

Meskipun demikian, kontribusi Paspampres pada lapisan regional ini bersifat lebih normatif dan simbolik. Paspampres bukan institusi yang memiliki peran langsung dalam perumusan kebijakan regional ASEAN, sehingga keterlibatannya lebih mencerminkan komitmen Indonesia terhadap profesionalisme dan transparansi dalam kerangka confidence building measures (CBMs) regional. Oleh karena itu, indikator regional ini kurang dominan dalam menjawab rumusan masalah penelitian dibandingkan dengan lapis bilateral.

Lapis 2: Kontribusi Bilateral Paspampres–PSS sebagai Fokus Utama

Lapis kedua merupakan inti analisis penelitian ini, di mana kontribusi Paspampres terhadap diplomasi pertahanan Indonesia–Korea Selatan tampak secara paling jelas dan langsung. Pada lapisan ini, Paspampres berfungsi sebagai aktor utama practical defence diplomacy melalui mekanisme latihan bersama yang berlangsung secara berkelanjutan sejak 2019 hingga 2023.

Pada tahun 2019, PSS membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti International VIP Protection Training sebagai bagian dari perluasan jaringan security

cooperation dengan negara mitra strategis. Pada 2020, meskipun terjadi pembatasan akibat pandemi, kedua negara mempertahankan interaksi melalui virtual tactical exchange yang difokuskan pada protokol pengamanan presiden dalam keadaan darurat biologis. Tahun 2021 ditandai dengan resumsi latihan tatap muka melalui agenda close-protection drill, advance team coordination, dan latihan respons cepat terhadap potensi serangan aktif. Pada 2022, fase peningkatan interoperabilitas taktis berlangsung dengan mencakup penyelarasan prosedur ring pengamanan, kemampuan komunikasi, serta simulasi evakuasi presiden dalam skenario serangan bersenjata atau ancaman teknologi tinggi.

Dalam perspektif kerangka Gindarsah, kontribusi pada lapisan ini mencakup ketiga indikator diplomasi pertahanan secara komprehensif. Pada aspek confidence building, latihan yang berulang dan berkelanjutan membangun hubungan profesional berbasis pengalaman operasional langsung, menurunkan ketidakpastian strategis, dan membuka ruang bagi kerja sama yang lebih sensitif di masa depan. Hal ini tercermin dalam keterbukaan pertukaran SOP, diskusi evaluatif pasca-latihan, serta keberlanjutan agenda kerja sama meskipun menghadapi gangguan eksternal pandemi.

Pada aspek capacity building, melalui latihan bersama PSS, Paspampres memperoleh paparan terhadap pendekatan pengamanan yang beroperasi dalam lingkungan ancaman tinggi, meliputi perencanaan rute berlapis, advance security operations, respons cepat terhadap ancaman asimetris, serta integrasi unsur intelijen dalam pengambilan keputusan taktis. Transfer pengetahuan konseptual dan prosedural ini meningkatkan profesionalisme Paspampres, walaupun tidak seluruh praktik PSS dapat diadopsi secara penuh karena perbedaan konteks domestik dan keterbatasan teknologi.

Pada aspek defence cooperation, kerja sama Paspampres–PSS tidak hanya bersifat operasional tetapi juga memperkuat institusionalisasi hubungan pertahanan Indonesia–Korea Selatan. Penandatanganan berbagai nota kesepahaman dan penguatan forum kerja sama pertahanan menunjukkan bahwa hubungan kedua negara bergerak dari fase ad hoc menuju fase institusional, yang menjamin kesinambungan kerja sama lintas pemerintahan dan menciptakan jalur formal untuk pengembangan kerja sama lanjutan. Indikator-indikator kuat seperti frekuensi interaksi, pertukaran praktik terbaik, peningkatan interoperabilitas prosedural, dan keberlanjutan kerja sama menjadikan Lapis 2 sebagai indikator paling dominan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Lapis 3: Kontribusi pada Dimensi Global/PKO dan Penguatan Indo-Pasifik

Pada lapisan ketiga, kerja sama Paspampres–PSS terhubung dengan dinamika geopolitik yang lebih luas, memberikan dampak pada persepsi kedua negara sebagai aktor keamanan internasional. Indonesia dan Korea Selatan merupakan kontributor signifikan dalam misi penjaga perdamaian PBB. Sepanjang 2023, Korea Selatan aktif dalam operasi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), sementara Indonesia menempati posisi kedelapan dunia sebagai kontributor personel terbanyak dalam misi PKO PBB.

Peningkatan kapasitas Paspampres melalui kerja sama dengan PSS memiliki relevansi langsung terhadap operasi PKO modern yang kini sering melibatkan perlindungan tokoh masyarakat, pejabat sipil, dan misi diplomatik di negara rawan konflik. Dengan meningkatkan kapasitas pengamanan VVIP, Indonesia pada dasarnya memperkuat kemampuan personelnnya beroperasi dalam lingkungan multinasional yang membutuhkan

keterampilan pengamanan terintegrasi, manajemen evakuasi, dan asesmen ancaman keterampilan yang juga relevan dalam konteks misi PKO.

Dimensi Indo-Pasifik juga memberikan konteks strategis bagi kerja sama ini. Korea Selatan di bawah New Southern Policy memprioritaskan penguatan hubungan keamanan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang inklusif dan non-konfrontatif. Indonesia pada sisinya mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan inklusivitas dan kerja sama non-konfrontatif. Harmonisasi kedua pendekatan ini menciptakan kesamaan visi dan menjadikan kerja sama pengamanan VVIP sebagai low-political-cost instrument yang aman, tidak provokatif, dan sangat kompatibel dengan AOIP maupun NSP.

Konvergensi ancaman kontemporer juga memperkuat relevansi lapis ketiga ini. Pembunuhan mantan PM Jepang Shinzo Abe pada Juli 2022 mengubah paradigma keamanan pejabat publik di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, meningkatkan kesadaran regional terhadap kerentanan pengamanan di ruang terbuka dan memperkuat legitimasi politik bagi peningkatan kapasitas unit pengamanan melalui kerja sama internasional. Selain itu, ancaman drone terhadap kepala negara di berbagai kawasan mendorong adopsi protokol counter-UAV dalam pelatihan internasional tingkat VVIP, termasuk modul yang telah menjadi bagian dari program pelatihan PSS sejak 2021.

Faktor Intervening dalam Kerja Sama Paspampres–PSS

Kerja sama latihan bersama Paspampres–PSS tidak berlangsung secara linear maupun bebas hambatan. Terdapat beberapa faktor intervening yang beroperasi di antara level kebijakan dan implementasi teknis, memengaruhi dinamika dan efektivitas kontribusi Paspampres dalam diplomasi pertahanan.

Komitmen politik bilateral merupakan faktor pendorong yang paling fundamental. Hubungan pertahanan Indonesia–Korea Selatan ditopang oleh mekanisme formal seperti Defence Industry Cooperation Committee (DICC), dialog tingkat menteri pertahanan, serta pertemuan kepala negara yang secara konsisten menegaskan pentingnya kerja sama strategis. Keberadaan forum institusional ini menyediakan legitimasi politik dan kerangka hukum bagi pelaksanaan latihan bersama. Dalam perspektif Cottey dan Forster, kerangka institusional ini berfungsi menurunkan biaya politik (political transaction costs) dari kerja sama militer non-tempur dan memastikan keberlanjutan hubungan di luar siklus pemerintahan.

Faktor geopolitik kawasan, khususnya dinamika keamanan di Semenanjung Korea, menjadi variabel intervening yang secara tidak langsung mendorong Korea Selatan memperluas jaringan kerja sama ke Asia Tenggara. Ancaman berkelanjutan dari program nuklir dan misil Korea Utara mendorong Seoul menerapkan strategi hedging melalui diversifikasi mitra keamanan di luar aliansi tradisionalnya. Bagi Indonesia, konteks ini menciptakan peluang untuk memperoleh manfaat kapasitas dan pelatihan tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar, sejalan dengan prinsip ASEAN centrality dan pendekatan non-blok kebijakan luar negeri Indonesia.

Pandemi COVID-19 pada 2020–2021 merupakan faktor pembatas eksternal yang signifikan. Pembatasan perjalanan internasional dan protokol kesehatan menyebabkan latihan fisik dan simulasi lapangan harus ditunda atau dialihkan ke format daring, mengurangi efektivitas transfer keterampilan taktis dan kinestetik. Namun pandemi juga

mendorong adaptasi melalui table-top exercises, diskusi SOP, dan pertukaran konseptual, sekaligus berfungsi sebagai stress test terhadap ketahanan kerja sama. Kemampuan kedua institusi mempertahankan komunikasi dan agenda pelatihan selama krisis global menunjukkan tingkat kepercayaan dan komitmen yang relatif matang.

Perbedaan doktrin dan budaya operasional menjadi faktor intervening yang memengaruhi derajat interoperabilitas. PSS beroperasi dalam konteks ancaman tinggi dengan SOP yang cenderung lebih agresif, berlapis, dan berbasis intelijen ofensif. Sebaliknya, Paspampres beroperasi dalam konteks domestik dengan tingkat ancaman relatif lebih rendah dan batasan hukum yang lebih ketat dalam penggunaan kekuatan di ruang publik. Perbedaan ini menyebabkan tidak semua praktik PSS dapat diadopsi langsung tanpa penyesuaian hukum dan normatif.

Keterbatasan teknologi dan sensitivitas intelijen juga membatasi kedalaman transfer kapabilitas. Beberapa metode pengamanan PSS bergantung pada sistem komunikasi terenkripsi, sensor counter-UAV, dan integrasi intelijen berbasis teknologi tinggi yang memerlukan investasi besar. Selain itu, pengamanan VVIP merupakan domain yang paling sensitif karena melibatkan informasi intelijen strategis dan metode perlindungan real-time, sehingga negara pemberi pelatihan cenderung membatasi transfer informasi yang dapat membahayakan sumber dan metode intelijennya.

Outcome Diplomasi Pertahanan Indonesia–Korea Selatan

Kerja sama Paspampres–PSS menghasilkan outcome diplomasi yang bersifat multidimensional dan mencakup beberapa dimensi yang saling terkait.

Outcome paling fundamental adalah terbentuknya strategic trust dan mutual confidence antara Indonesia dan Korea Selatan. Latihan yang berlangsung berulang selama 2019–2023 memungkinkan kedua institusi membangun hubungan profesional berbasis pengalaman operasional langsung, bukan semata komitmen politik di atas kertas. Kepercayaan ini tercermin dalam keterbukaan pertukaran SOP, diskusi evaluatif pasca-latihan, serta keberlanjutan agenda kerja sama meskipun menghadapi gangguan eksternal seperti pandemi. Bagi Indonesia, kepercayaan ini memperkuat posisi Paspampres sebagai mitra profesional yang diakui oleh institusi keamanan negara maju, sementara bagi Korea Selatan, kerja sama ini memperluas jejaring keamanan strategisnya di Asia Tenggara.

Outcome penting lainnya adalah peningkatan kapasitas institusional Paspampres. Melalui latihan bersama PSS, Paspampres memperoleh paparan terhadap pendekatan pengamanan modern yang beroperasi dalam lingkungan ancaman tinggi. Meskipun tidak seluruh praktik dapat diadopsi secara penuh, transfer pengetahuan konseptual dan prosedural meningkatkan profesionalisme Paspampres secara berkelanjutan. Dalam kerangka Gindarsah, outcome ini mencerminkan fungsi capacity building diplomasi pertahanan, di mana nilai utama kerja sama bukan pada alih senjata, melainkan pada penguatan kompetensi sumber daya manusia dan institusi.

Kerja sama ini juga menghasilkan outcome berupa penguatan institusional hubungan pertahanan Indonesia–Korea Selatan. Penandatanganan berbagai nota kesepahaman, termasuk MoU on Peacekeeping and Strategic Cooperation pada 2023, menunjukkan bahwa hubungan kedua negara bergerak dari fase ad hoc menuju fase institusional. Institusionalisasi

ini menjamin kesinambungan kerja sama lintas pemerintahan dan menciptakan jalur formal untuk pengembangan kerja sama lanjutan.

Outcome signifikan lainnya adalah peningkatan reputasi internasional Indonesia sebagai mitra keamanan yang kredibel dan profesional. Keterlibatan aktif Paspampres dalam latihan internasional dengan PSS memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam modernisasi pengamanan pejabat negara dan mampu beradaptasi dengan ancaman kontemporer. Reputasi ini memiliki implikasi langsung terhadap posisi Indonesia di forum multilateral, khususnya ASEAN, ADMM-Plus, dan kontribusi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Meskipun outcome di atas bersifat positif, efektivitasnya tetap memiliki batasan. Pertama, keberlanjutan outcome sangat bergantung pada komitmen politik dan alokasi anggaran nasional. Kedua, keterbatasan teknologi dan sensitivitas intelijen membatasi kedalaman transfer kemampuan. Ketiga, perbedaan doktrin dan konteks ancaman domestik membuat adopsi praktik asing harus dilakukan secara selektif. Oleh karena itu, outcome diplomasi pertahanan harus dipahami sebagai proses bertahap (*incremental gains*), bukan transformasi instan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Paspampres memberikan kontribusi yang nyata, berlapis, dan berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan Indonesia–Korea Selatan, meskipun kontribusi tersebut lebih menonjol pada dimensi non-konvensional dan non-tempur dibandingkan aspek militer tradisional. Kontribusi Paspampres dalam diplomasi pertahanan tidak berdiri sebagai aktivitas teknis pengamanan semata, melainkan berfungsi sebagai instrumen *defence diplomacy* yang memperkuat kepercayaan strategis, meningkatkan kapasitas institusional, serta memperluas jaringan kerja sama keamanan Indonesia dengan Korea Selatan.

Berdasarkan analisis berlapis, kontribusi paling dominan Paspampres ditemukan pada Lapis 2, yakni kerja sama bilateral teknis-operasional Paspampres–PSS. Pada lapisan ini, Paspampres berfungsi sebagai aktor utama *practical defence diplomacy* yang secara langsung membangun interoperabilitas teknis, meningkatkan kapasitas pengamanan VVIP, serta menciptakan *mutual trust* melalui interaksi profesional yang berulang dan berkelanjutan sejak 2019 hingga 2023. Paspampres tidak hanya berperan sebagai penerima pelatihan, tetapi juga sebagai mitra yang diakui dalam jaringan pengamanan VVIP internasional yang dibangun oleh PSS.

Pada Lapis 1 (*Regional Confidence Building*), kontribusi Paspampres bersifat pendukung dan simbolik dalam konteks ASEAN, ARF, dan ADMM-Plus. Sementara pada Lapis 3 (*Global/PKO dan Penguatan Indo-Pasifik*), kontribusinya bersifat tidak langsung namun strategis, yakni memperkuat kesiapan Indonesia dalam konteks operasi multinasional dan misi penjaga perdamaian PBB, serta meningkatkan reputasi internasional Indonesia sebagai mitra keamanan yang profesional.

Analisis faktor *intervening* menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi pertahanan sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola variabel-variabel eksternal dan internal secara adaptif. Komitmen politik bilateral, konteks geopolitik kawasan, dan keselarasan visi Indo-Pasifik menjadi faktor penguat, sementara pandemi COVID-19,

perbedaan doktrin, keterbatasan teknologi, dan sensitivitas intelijen berperan sebagai faktor pembatas yang mengurangi kedalaman transfer kapabilitas.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan argumen teoretis bahwa diplomasi pertahanan modern tidak hanya dijalankan oleh angkatan bersenjata konvensional, tetapi juga oleh unit elite non-tempur seperti Paspampres, yang mampu berperan sebagai instrumen efektif dalam membangun relasi strategis antarnegara secara berkelanjutan. Kerja sama Paspampres–PSS periode 2019–2023 menghasilkan outcome multidimensional berupa kepercayaan strategis, peningkatan kapasitas institusional, penguatan hubungan bilateral, dan peningkatan reputasi internasional Indonesia, sebuah bukti bahwa diplomasi pertahanan bahkan pada level unit pengamanan VVIP dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun relasi strategis jangka panjang antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Terjemahan T. R. Rohidi). UI-Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.
- Al-Fadhat, F., & Effendi, N. N. A. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia–Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Kajian Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/48822>
- Fatrianshar, P., & Bainus. (2025). Indonesia–South Korea Defense Cooperation: Opportunities and Challenges. *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(1). <https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/download/1578/809/>
- Gindarsah, I. (2015). Defence Diplomacy of Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 37(1), 87–113. <https://doi.org/10.1355/cs37-1c>
- Lee, S. H. (2016). South Korea's Defense Diplomacy in Southeast Asia. RSIS Working Paper. <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/wp305-south-koreas-defense-diplomacy-in-southeast-asia/>
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research. *Perfusion*. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Ryvantya, K. S. (2024). Indonesia–South Korea Security Cooperation: Progress, Problems, and Possibilities in Defence Diplomacy. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1). <https://doi.org/10.70836/jh.v9i1.47>

- Tanduk, Y. B. (2022). Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam Proses Transfer of Technology (ToT) pada Pengembangan Kapal Selam KRI Alugoro 405 Tahun 2015–2019. *Balcony Journal, FISIP Universitas Budi Luhur*. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/272>
- Tanjung, J. (2025). Peran Paspampres dan Dampaknya terhadap Penguatan Diplomasi Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. *Dinamika Global Security Journal*. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/DGSJ/article/view/4611>
- ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). (2022). Chairman's Statement of the 16th ADMM. Phnom Penh.
- Council on Foreign Relations. (2023). North Korea's Missile Program. CFR Backgrounder. <https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-missile-program>
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI. (2021, 16 September). The 10th Defence Industry Cooperation Committee (DICC) RI–Korea. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2021/09/16/the-10th-defence-industry-cooperation-committee-dicc-ri-korea-jakarta-16-september-2021.html>
- International Institute for Strategic Studies (IISS). (2022). *The Military Balance 2022*. Routledge. <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance>
- Presidential Committee on New Southern Policy. (2019). *New Southern Policy: Policy Overview*. Republic of Korea. <https://www.nsp.go.kr/eng/policy.do>
- Republic of Korea Ministry of National Defense. (2023, 17 August). ROK–Indonesia Defense Ministers Sign MoU to Strengthen Strategic Cooperation. MND Press Release. <https://www.mnd.go.kr/eng>
- United Nations Department of Peace Operations (UNDPO). (2023). Troop and Police Contributors Ranking. United Nations. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- United Nations Peacekeeping. (2025, 31 January). Peacekeeping Contributor Profile: Country Rankings. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/02_country_ranking_82_january_2025.pdf